

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara di dunia tidak hanya berfokus pada tingginya laju perekonomian, faktor yang juga memiliki peran penting dalam keberhasilan tersebut adalah pembangunan kualitas manusia di dalamnya. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan setiap negara bertujuan agar kesejahteraan masyarakatnya mengalami peningkatan (Rukiah, 2018). Maju atau tidaknya suatu negara juga dapat dilihat dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya, karena pembangunan manusia menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur keberhasilan suatu negara (A. Karim, 2015).

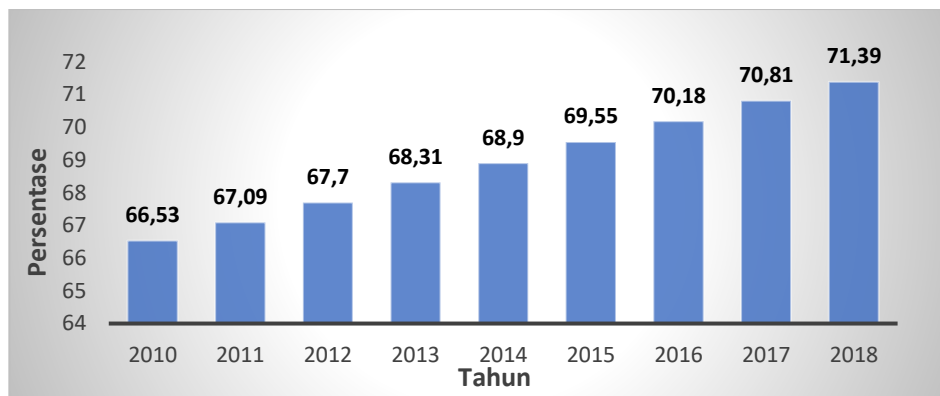
Pembentukan modal manusia menjadi sebuah proses dalam meningkatkan jumlah SDM yang memiliki suatu keahlian, pengalaman dan pendidikan yang menentukan pembangunan suatu negara. Manusia menjadi modal utama dalam membangun suatu negara (A. Karim, 2015). Manusia memiliki peranan yang penting dalam sebuah pembangunan, tidak hanya menjadi objek di dalamnya tetapi diharapkan dapat menjadi subjek dalam pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan negara (Pratowo, 2011).

Berkaitan dengan pengukuran kualitas pembangunan manusia, sejak tahun 1990 hingga saat ini, *United Nations Development Program* (UNDP) telah menerbitkan laporan yang berisi hasil perbandingan pembangunan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, yang disebut dengan *Human Development Report* (UNDP, 2019). Hasil dari laporan tersebut, dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tinjauan ulang untuk bahan penyusunan suatu pengukuran kualitas pembangunan manusia, atau yang disebut dengan *Human Development Index* (HDI) (Suharno, 2019).

Tujuan pengukuran dengan menggunakan HDI yaitu untuk membangun sebuah indikator yang mengukur dimensi dasar dari pembangunan manusia dan memperluas kebebasan memilih, dengan menciptakan ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi (Wicaksono, 2014). Terkait dengan pembangunan manusia, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kualitas

pembangunan manusia yang rendah, terbukti dari data peringkat HDI di beberapa negara dunia yang diterbitkan oleh (UNDP, 2019) menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 111 dari 184 negara, dan jika dilihat di antara negara-negara ASEAN posisi Indonesia masih berada di bawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina dengan peringkat yang tentunya lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Pembangunan manusia memiliki *multiplier effect* jangka panjang dan saat dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu bangsa (Hasibuan et al., 2019). Berikut ini merupakan perkembangan HDI di Indonesia dari Tahun 2010 – 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1

Perkembangan *Human Development Index* di Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 HDI Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia mencapai 71,39 % meningkat 0,58 % dari tahun 2017 dan rata-rata peningkatan dari tahun ke tahun mencapai 0,61 %. Data pada Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa kondisi dari indeks pembangunan manusia di Indonesia berada pada kategori sedang bila dilihat dari standar HDI yang dikeluarkan oleh UNDP, umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada tahun 2018 mencapai 71,2 tahun, meningkat 0,14 tahun dari tahun sebelumnya. Kemudian, harapan lama sekolah (HLS) anak berusia 7 tahun naik 0,06 tahun menjadi 12,91 tahun (hingga jenjang Diploma I). Selain itu, penduduk berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah

(RLS) yang meningkat 0,07 tahun menjadi 8,17 tahun yang diperkirakan sampai kelas IX atau setara dengan kelas 3 sekolah menengah pertama (Katadata, 2019).

Peningkatan HDI di Indonesia dari tahun ke tahun tetap saja menyisakan berbagai macam persoalan, diantaranya adalah kesenjangan pembangunan kualitas manusia di 34 provinsi di Indonesia masih sangat tinggi. Data BPS (2018) menyebutkan bahwa terdapat 12 provinsi dengan kriteria HDI sedang, 21 provinsi dengan kriteria HDI tinggi, dan satu provinsi dengan kriteria HDI sangat tinggi. Provinsi dengan kriteria HDI sedang masih didominasi oleh wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku dan Papua. Sedangkan, provinsi dengan kriteria HDI tinggi didominasi oleh wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera, Jawa dan Kalimantan dan kriteria HDI sangat tinggi diperoleh DKI Jakarta. Jika dilihat dalam segi persentase jumlah provinsi dengan kriteria HDI sedang sebesar 36 %, HDI tinggi sebesar 61 % dan HDI sangat tinggi sebesar 3 %. Hasil perhitungan persentase tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia khususnya di daerah masih memiliki kesenjangan yang jauh.

United Nation Development Programme (UNDP) menilai ada beberapa indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan HDI di Indonesia. *Pertama*, tingkat kemiskinan dan kelaparan, UNDP mencatat ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. *Kedua*, tingkat kesehatan dan kematian, tercatat sebanyak 2 juta anak di bawah satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. *Ketiga*, akses layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir 5 juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi (Fauzi, 2017).

Data dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-62 negara paling timpang di dunia dari 139 negara, dengan indeks gini sebesar 0,389 (CNBC Indonesia, 2018). Ketimpangan yang terjadi di Indonesia akibat dari tidak meratanya distribusi kekayaan yang ada, sebagian besar aset kekayaan masih dikuasi oleh segelintir orang, fenomena ini yang menjadi representasi bahwa distribusi kekayaan di Indonesia belum cukup adil (Marlina et

al., 2019). Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, namun dengan pola ekonomi konvensional yang digunakan saat ini, sangat mustahil untuk dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang ada (Juliana et al., 2018).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu memiliki landasan nilai-nilai moral dan spiritual dalam menjalankan aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pembangunan. Pola ekonomi dan pembangunan yang diusung secara konvensional sangat jauh dari tujuan yang hendak diraih dalam Islam, yaitu kesejahteraan yang berujung pada pemenuhan kebutuhan material dan non-material (Rukiah, 2018). Selain itu, nilai dan etika yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan nilai-nilai yang diusung oleh sistem konvensional, dalam Islam nilai-nilai spiritual menjadi dasar utama yang membedakannya sehingga kesejahteraan yang hendak dicapai pun tidak semata hanya terpusat pada kesejahteraan duniawi saja, Islam memandang bahwa kesejahteraan yang sebenarnya adalah kesejahteraan yang bernilai dunia juga akhirat (Juliana et al., 2018).

Pemenuhan kesejahteraan dalam lingkup ekonomi Islam dinamakan dengan konsep *maslahah*, yang hanya bisa dicapai jika 5 tujuan dari *maqashid syariah* terpenuhi, konsep pembangunan ini dapat menjadi alternatif dalam merumuskan kembali arti dari pembangunan manusia yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari kesejahteraan (Anto, 2009). Pengukuran kualitas pembangunan manusia dalam perspektif Islam bukan hanya dilihat dari aspek angka harapan hidup, angka melek huruf dan pengeluaran per kapita, namun harus meliputi segala aspek yang terdapat dalam *maqashid syariah* (R. M. Putri & Mintaroem, 2020).

Pengukuran tingkat pembangunan manusia yang ditawarkan oleh UNDP belum sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam karena konsep yang mendasari perhitungan HDI tidak didasarkan pada *maqashid syariah*, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika pengukuran tingkat pembangunan manusianya dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human*

Development Index (IHDI), karena konsep dan teori yang digunakan dalam mendasari perhitungan IHDI didasarkan pada nilai-nilai keislaman (Ningrum et al., 2020). Sistem pembangunan dalam perspektif Islam memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, menekankan bahwa manusia tidak terbatas sebagai makhluk materi, lebih dari hal tersebut, bahwa manusia merupakan makhluk spiritual (Asmuni, 2014).

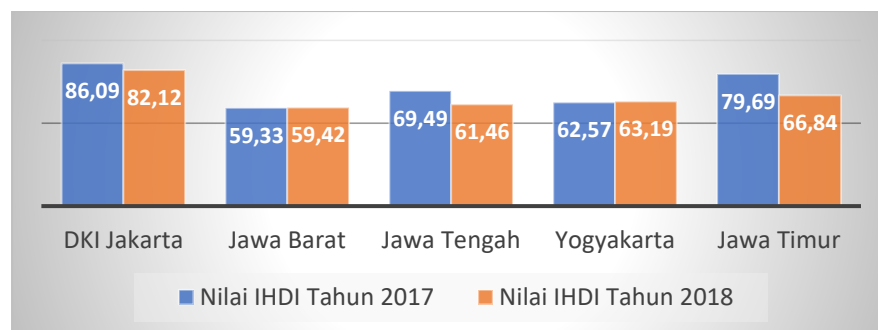
Islamic Human Development Index (IHDI) menjadi indeks yang secara rinci mengukur kesejahteraan manusia, dengan landasan *maqashid syariah* dan pendekatan matematis. Konsep mengenai *Islamic Human Development Index* (IHDI) merupakan, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Hendri Anto MB (2009) dalam *Introducing an Islamic Human Development Index (IHDI) to Measure Development in OIC Countries*. IHDI menggambarkan konsep kebutuhan dasar manusia dalam tiga aspek *maqashid syariah*, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dan dari tiga aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator indeks pembangunan manusia, khususnya aspek *dharuriyyat* yang terdiri dari lima elemen (Anto, 2009; Rukiah, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Anto, (2009) memberikan gambaran terkait perhitungan IHDI dengan menggambarkan kelima dimensi *maqashid syariah*. Dimensi agama (*ad-dien*) dihitung dengan menggunakan indikator angka kriminalitas dan angka partisipasi siswa sekolah agama, dimensi jiwa (*an-nafs*) dihitung dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, untuk dimensi intelektual (*al-aql*) digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dimensi keturunan (*an-nasl*) menggunakan dua indikator yaitu angka dan angka kematian bayi, dan untuk dimensi harta (*al-maal*) digunakan data gabungan dari dua indikator yaitu, indikator kepemilikan harta oleh individu (menggunakan data pengeluaran perkapita riil disesuaikan) dan indikator distribusi pendapatan (menggunakan data indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan).

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 207 juta jiwa, dan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia

dengan total penduduk mencapai 41.314.121 jiwa (BPS Jawa Barat, 2018). Selain itu Jawa Barat juga memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 8.343 pondok pesantren (Lidwina, 2020), dan memiliki kultur yang lekat dengan ajaran Islam, oleh karena itu IHDI sangat relevan bila digunakan dalam pengukuran kesejahteraan manusia di Jawa Barat (Iim Koyimah et al., 2020).

Jawa Barat memiliki nilai IHDI yang masih tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa provinsi terdekatnya, berikut ini merupakan data terkait nilai IHDI yang diperoleh oleh Jawa Barat dan beberapa provinsi terdekatnya pada tahun 2017.



Gambar 1.2
Nilai Komparasi IHDI Jawa Barat dan Provinsi Terdekatnya
Tahun 2017 - 2018

Sumber: (Rama & Yusuf, 2019; Rukiah & Siregar, 2019; Suharno, 2019; Iim Koyimah et al., 2020) *data diolah peneliti, 2021*

Berdasarkan data pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa Jawa Barat memiliki nilai IHDI terendah jika dibandingkan dengan beberapa provinsi terdekatnya, pencapaian IHDI di Jawa Barat dapat terlihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Rama & Yusuf, (2019) menunjukkan bahwa pembangunan kualitas manusia di Provinsi Jawa Barat yang jika diukur dengan menggunakan IHDI berada diposisi ke 29 dengan nilai IHDI 43% (termasuk ke dalam kategori rendah). Jika dilihat dari sisi peringkat IHDI yang ada Provinsi Jawa Barat masih tertinggal dari Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat, di mana Jakarta berada di peringkat ke 22, Jawa Tengah menempati peringkat ke 11 dan Jawa Timur yang menempati peringkat ke 27.

Wiwit Nur Vina, 2021

ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2019

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Rendahnya nilai IHDI yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dapat merepresentasikan nilai kualitas pembangunan manusia yang juga rendah, rendahnya kualitas pembangunan manusia yang ada dapat memberikan dampak terhadap beberapa sektor kehidupan diantaranya sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Manusia memiliki peran penting dalam sektor tersebut, jika kualitas pembangunan manusia tidak memadai maka kemunduran terhadap perkembangan beberapa sektor penting dalam kehidupan pun akan terjadi dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemunduran perkembangan pembangunan di suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan Suharno, (2019) juga menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam kategori sedang jika diukur dengan menggunakan IHDI. Penelitian terkait IHDI yang dilakukan oleh Iim Koyimah et al., (2020) menyebutkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan IHDI menunjukkan hasil yang tidak optimal, karena nilai indeks *ad-dien*, *an-nasl*, dan *al-maal* yang rendah. Rama & Yusuf, (2019) juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai IHDI dikarenakan rendahnya nilai indeks *ad-dien* yang ditunjukkan oleh tingkat kejahatan dan korupsi serta rendahnya nilai indeks *al-maal* yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi.

Rukiah & Siregar, (2019) dan Ningrum et al., (2020) mengatakan bahwa IHDI yang tinggi dan merata akan tercapai jika negara memfasilitasi pembangunan dengan baik, dengan memperhatikan aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat diharapkan mampu memberikan andil dalam pembangunan dan peningkatan *Islamic Human Development Index* (IHDI), dalam hal ini negara memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal, khususnya pada alokasi anggaran pengeluaran negara dalam bidang pendidikan dan kesehatan baik pada tingkat pusat dan daerah (Syauki Beik & Arsyianti, 2016).

Selain pada aspek pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diperlihatkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan produktivitas

masyarakat, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Suliswanto et al., 2015). Tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga dapat direpresentasikan dengan nilai PDRB di suatu daerah (Rochmah & Sukmana, 2019), perkembangan PDRB suatu daerah mampu memberikan gambaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti, banyaknya barang dan jasa yang diproduksi, besaran pendapatan yang diterima dan penggunaan pendapatan tersebut (BPS, 2011).

Penelitian mengenai pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap *Islamic Human Development Index* (IHDI) masih sangat terbatas bila dibandingkan penelitian yang membahas terkait *Human Development Index* (HDI). Adapun penelitian yang terkait dengan pengaruh PDRB, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap HDI maupun IHDI, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rochmah, (2019) menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap IHDI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suharno, (2019) menunjukkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap IHDI. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustina et al., 2016; Heriyanto, 2013) menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Kushwah & Tiwari, 2013; Fahmi & Dalimunthe, 2018; Rukiah & Siregar, 2019; Maharda & Aulia, 2020) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bhakti et al., (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian lainnya terkait dengan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan pernah dilakukan oleh (Bhakti et al., 2018; Rukiah & Siregar, 2019) kebijakan fiskal pada bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharda & Aulia, (2020) pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia,

dan penelitian yang dilakukan oleh Kushwah & Tiwari, (2013) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda-beda serta masih terbatasnya penelitian terkait IHDI yang dilakukan di Indonesia, sehingga penulis termotivasi untuk meneliti pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah terhadap IHDI, guna memberikan informasi yang dibutuhkan bagi akademisi, praktisi serta aparatur pemerintahan terkait dengan isu pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Oleh karena itu judul penelitian skripsi yang diajukan adalah **“Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap *Islamic Human Development Index* di Jawa Barat Tahun 2013 – 2019 ”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Tingkat HDI Indonesia berada pada posisi 111 dari 185 negara dan di antara negara-negara ASEAN posisi Indonesia menempati posisi ke 5 dan masih berada di bawah negara Singapura, Malaysia dan Thailand (UNDP, 2019).
2. HDI di Indonesia kerap kali mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih menyisakan persoalan kesenjangan pembangunan di 34 provinsi yang ada. (Fauzi, 2017).
3. Pola pembangunan yang diusung secara konvensional sangat jauh dari tujuan yang hendak diraih dalam Islam, yaitu kesejahteraan yang berujung pada pemenuhan kebutuhan material dan non-material (Rukiah, 2018).
4. Pengukuran tingkat pembangunan manusia yang ditawarkan UNDP belum sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam (Ningrum et al., 2020).
5. Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia, pada tahun 2017 memiliki nilai IHDI yang masih tergolong

sedang dengan nilai sebesar 43 %, dan tertinggal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Rama & Yusuf, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Islamic Human Development Index* (IHDI), nilai PDRB, dan nilai pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019?
2. Bagaimana pengaruh nilai PDRB terhadap *Islamic Human Development Index* (IHDI) di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019?
3. Bagaimana pengaruh nilai pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap *Islamic Human Development Index* (IHDI) di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019?
4. Bagaimana pengaruh nilai pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap *Islamic Human Development Index* (IHDI) di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah, untuk mengetahui *Islamic Human Development Index* (IHDI) di Jawa Barat dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari nilai PDRB dan nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IHDI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, perhitungan yang digunakan dalam IHDI menggunakan landasan *maqashid syariah* yang terdiri atas dimensi agama (*ad-dien*), akal (*al-aql*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-maal*) dalam perhitungannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan penulis adalah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya pada bidang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang *Islamic Human Development Index* (IHDI).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik (menyeluruh) di masa mendatang serta untuk mewujudkan *Sustainable Development Goal's* (SDG'S) melalui peningkatan *Islamic Human Development Index* (IHDI).